



Evaluasi atas Efektivitas Anggaran Dana Desa Dalam Mengurangi Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat

*“Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin desa”
-Mohammad Hatta*

Oleh: willy Andersen siahaan
Auditor Pertama Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

BAB I

Data Umum Objek Pengawasan

A. Gambaran Umum Dana Desa Secara Nasional

Desa telah sejak lama dianggap menjadi “sarang” kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memajukan desa. Sejak ditetapkannya Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa telah ditempatkan sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat paling hilir. Sekitar 400,1 triliun telah digelontorkan oleh pemerintah pusat langsung ke desa sejak tahun 2015 sampai dengan 2021. Tahun 2022 pagu dana desa telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan ke 74.961 desa di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Meski mengalami penurunan sekitar 4 triliun dari tahun 2021, itu tetap menjadi angka yang fantastis mengingat dana ini dikelola oleh desa.

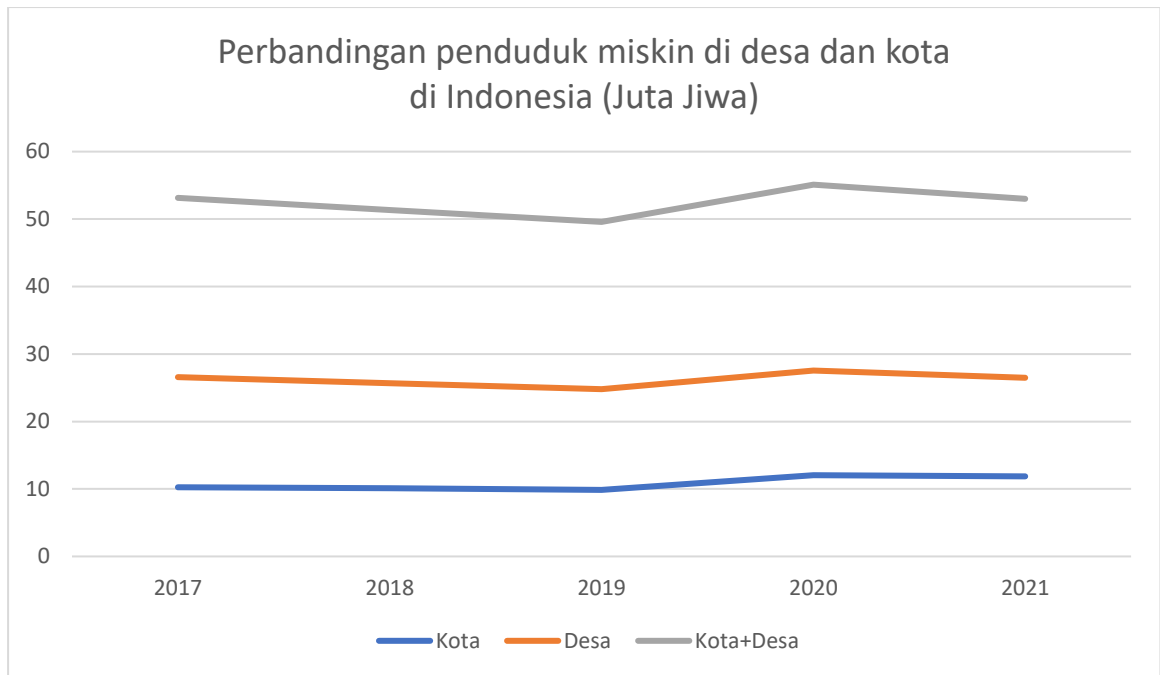
Dana yang sangat besar ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada di desa. Namun sayangnya laju penurunan kemiskinan pada periode 2017-2021 cenderung lambat dan stagnan. Hal ini terlihat dari data jumlah penduduk miskin di desa sebagaimana disajikan dalam tabel 1 yang selalu lebih tinggi dari penduduk yang hidup di perkotaan.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Menurut Wilayah (Juta Jiwa)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kota	10.27	10.13	9.86	12.04	11.86
Desa	16.31	15.54	14.93	15.51	14.64
Kota+Desa	26.58	25.67	24.79	27.55	26.50

Sumber data: BPS

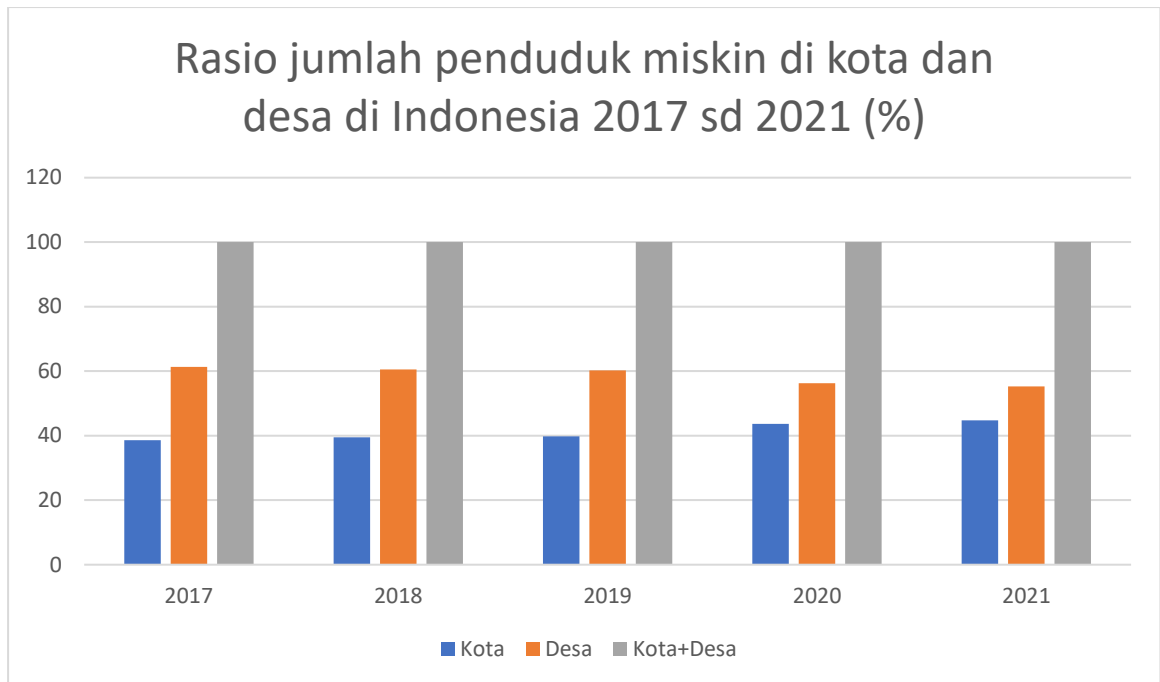


Selain itu, berdasarkan analisis terhadap rasio kemiskinan di desa dan kota, angka kemiskinan di desa selalu mendominasi, meskipun mengalami tren penurunan dan mencapai titik terendahnya di tahun 2021 yaitu sebesar 55,25% dari total kemiskinan di Indonesia. Data rasio kemiskinan di desa dan kota di Indonesia disajikan pada tabel 2.

Tabel 2
Rasio jumlah penduduk miskin di kota dan desa di Indonesia 2017 sd 2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kota	38.64%	39.47%	39,77%	43,70%	44,75%
Desa	61.36%	60,53%	60.23%	56,30%	55,25%
Kota+Desa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Diolah dari BPS



Berdasarkan analisis ini, jumlah penduduk miskin di desa memang cenderung menurun dari tahun 2017 hingga 2021. Namun jika diteliti lebih jauh penyebab utama rasio ini turun adalah peningkatan signifikan penduduk miskin di perkotaan pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19. Jumlah penduduk miskin di desa juga mengalami peningkatan pada tahun 2020 tetapi tidak setinggi peningkatan yang terjadi di perkotaan, sehingga rasio penduduk miskin di desa dibandingkan dengan kota menjadi menurun cukup signifikan.

B. Gambaran Umum Dana Desa di Sulawesi Barat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa sendiri, telah masuk dalam Agenda Prioritas Pengawasan BPKP yaitu pada sektor Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, dengan tema Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Desa. Tema ini terdiri dari 3 topik yaitu Tata kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa, Tata kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa, serta Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa.

Objek pengawasan dalam Evaluasi atas Efektivitas Anggaran Dana Desa Dalam Mengurangi Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat adalah desa-desa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat sendiri merupakan provinsi yang terdiri dari 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Majene, Mamuju (ibukota), Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Total desa yang ada di provinsi ini adalah sebanyak 575 desa dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3

Rincian Jumlah Desa di Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Jumlah desa
1	Majene	62
2	Mamuju	88
3	Polewali Mandar	144
4	Mamasa	168
5	Pasangkayu	59
6	Mamuju Tengah	54
Jumlah		575

Masing-masing desa, setiap tahun menerima dana desa dari pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan. Data rata-rata anggaran dana desa yang diterima desa di wilayah provinsi Sulawesi barat sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 serta angka kemiskinan di masing-masing kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan dalam lampiran.

C. Matriks Desain Pengawasan

Matriks desain pengawasan untuk evaluasi atas efektivitas anggaran dana desa dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat ini tersaji dalam tabel 4.

Tabel 4
Matriks Desain Pengawasan

No	Pertanyaan Audit	Kriteria Digunakan	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan	Keterbatasan/Risiko	Antisipasi Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di desa di wilayah provinsi Sulawesi Barat?	1. UU Desa 2. PP 43/2014 jo PP 47/2015 jo PP 11/2019 3. Permendagri 20/2018 ttg Pengelolaan keuangan desa 4. Permendagri 73/2020 ttg Pengawasan keuangan desa	1. Data anggaran dana desa sejak 2017 sd 2021 2. Data tingkat kemiskinan per kabupaten di wilayah Sulawesi barat sejak 2017 sd 2021.	1. Pengolahan Data 2. Wawancara.	1. Analisis Deskriptif 2. Analisis Ratio 3. Analisis regresi	1. Databased Siskeudes tidak lengkap 2. Databased Siskeudes tidak updated 3. Databased Siskeudes tidak valid	1. Menggunakan data sekunder dari Kementerian Keuangan dan BPS.

Bab II

Kegiatan Analisis Data

a. Kegiatan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Metode ini untuk memberikan jawaban apakah anggaran yang diberikan pemerintah ke desa-desa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Analisis deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dan gambaran yang menjadi objek observasi yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun narasi yang bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami kondisi objek observasi.

Kegiatan analisis ini menggunakan data sekunder berupa data anggaran dana desa sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 (5 tahun) yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan data angka kemiskinan yang bersumber dari BPS (data disajikan dalam lampiran).

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan menggunakan *tools* Microsoft excel didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Anggaran Dana Desa (Rp)</i>		<i>Kemiskinan (%)</i>	
Mean	926944006.1	Mean	10.294
Standard Error	20994900.23	Standard Error	0.783207
Median	900592607.5	Median	10.42
Mode	1120368493	Mode	13.38
Standard Deviation	114993804.5	Standard Deviation	4.289802
Sample Variance	1.32236E+16	Sample Variance	18.4024
Range	382126438	Range	11.77
Minimum	740754589	Minimum	4.28
Maximum	1122881027	Maximum	16.05

b. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

Berdasarkan data yang disajikan dalam lampiran, penyusun melakukan regresi linier dengan menggunakan *tools* Microsoft excel dengan hasil sebagai berikut:

SUMMARY OUTPUT								
<i>Regression Statistics</i>								
Multiple R	0.101826041							
R Square	0.010368543							
Adjusted R Square	-0.024975438							
Standard Error	4.343041819							
Observations	30							
<i>ANOVA</i>								
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
Regression	1	5.533377258	5.533377258	0.293361	0.592358995			
Residual	28	528.1363427	18.86201224					
Total	29	533.66972						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	6.772925618	6.549087597	1.034178505	0.309903	-6.642272188	20.18812342	-6.642272188	20.18812342
Anggaran Dana Desa	3.79858E-09	7.01327E-09	0.541628027	0.592359	-1.05674E-08	1.81646E-08	-1.05674E-08	1.81646E-08

Nilai R Square yang hanya 0.01 mengandung makna bahwa korelasi antara anggaran dana desa dengan angka kemiskinan memiliki korelasi yang sangat rendah (tidak berpengaruh). Demikian pula nilai *signicance* F senilai 0.592358995 jauh diatas batas *cut off* signifikansi (signifikan jika <0.05) yang mengandung makna bahwa dana desa tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara statistik, anggaran dana desa tidak berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah provinsi Sulawesi Barat.

Bab III

Penutup

Berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan dalam Bab II, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dana desa belum mampu memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dibutuhkan evaluasi lebih jauh untuk menemukan penyebab dari tidak efektifnya anggaran dana desa untuk mengurangi kemiskinan.
3. Evaluasi lanjutan dapat berupa, memetakan jenis belanja yang dilakukan oleh desa dan menganalisis efektivitasnya, termasuk evaluasi terhadap BUMDes.

**Rata-Rata Anggaran Dana Desa dan tingkat Kemiskinan Per Kabupaten
di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat**

No	Tahun	Kabupaten	Anggaran Dana Desa (Rp)	Kemiskinan (%)
1	2017	Mamuju	816,518,170	6.88
2	2018	Mamuju	799,031,034	7.18
3	2019	Mamuju	897,920,306	7.06
4	2020	Mamuju	920,239,215	6.92
5	2021	Mamuju	945,571,875	7.46
6	2017	Majene	813,404,193	13.94
7	2018	Majene	861,039,387	13.79
8	2019	Majene	1,036,968,096	13.72
9	2020	Majene	1,051,418,935	13.73
10	2021	Majene	1,062,259,016	14.34
11	2017	Polewali Mandar	807,556,375	16.05
12	2018	Polewali Mandar	903,264,909	15.97
13	2019	Polewali Mandar	1,122,881,027	15.6
14	2020	Polewali Mandar	1,120,368,493	15.26
15	2021	Polewali Mandar	1,120,368,493	15.68
16	2017	Mamasa	767,262,946	13.51
17	2018	Mamasa	740,754,589	13.38
18	2019	Mamasa	858,093,636	13.42
19	2020	Mamasa	874,270,803	13.38
20	2021	Mamasa	874,270,803	13.77
21	2017	Mamuju Tengah	835,660,370	6.95
22	2018	Mamuju Tengah	837,518,592	7.14
23	2019	Mamuju Tengah	975,319,888	6.87
24	2020	Mamuju Tengah	1,015,816,370	6.79
25	2021	Mamuju Tengah	1,057,456,444	7.13
26	2017	Pasangkayu	821,967,372	4.84
27	2018	Pasangkayu	820,953,254	4.53
28	2019	Pasangkayu	989,759,016	4.28
29	2020	Pasangkayu	1,008,549,050	4.48
30	2021	Pasangkayu	1,051,857,525	4.77

Sumber data: Peraturan terkait penetapan dana desa serta data dari rendal PKD BPKP